

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA DESA DIMODERASI SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL PEMERINTAH DI KECAMATAN SIWALAN,  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

**SYARIFATUN NADIA**

**NIM: 4319136**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA DESA DIMODERASI SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL PEMERINTAH DI KECAMATAN SIWALAN,  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

**HANIFAH NADIA**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

**SYARIFATUN NADIA**

**NIM: 4319136**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifatun Nadia

Nim : 4319136

Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Agustus 2023



Syarifatun Nadia  
4319136

## NOTA PEMBIMBING

**Ina Mutmainah, M. Ak**

Bligo Rt 003/Rw 001, Buaran, Kab. Pekalongan

Lapm. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Syarifatun Nadia

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i :

Nama : Syarifatun Nadia

NIM : 4319136

Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian pula nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 26 Agustus 2023

Pembimbing,



**Ina Mutmainah, M. Ak.**  
**NIP. 199203312019032007**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, [www.febi.uingusdur.ac.id](http://www.febi.uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)  
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i :

Nama : Syarifatun Nadia  
NIM : 4319136  
Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan**  
Pembimbing : **Ina Mutmainah, M.Ak**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji I

**Agus Arwani, M.Ag**

**NIP. 19760807 201412 1 002**

Penguji II

**Muhammad Taufiq Abadi, M.M.**

**NIP. 19910828 201903 1 007**



Pekalongan, 13 November 2023  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**

**NIP. 19750220 199903 2 001**

**MOTTO**

*“Work Hard, Play Hard”*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi bekal untuk masa depan dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta. Bapak Bambang Sucahyo (Alm) dan Ibu Supriyatiningih yang selalu dan tidak pernah putus mendoakan dan selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Untuk sahabat saya sekaligus teman seperjuangan Milda, Ratna, Aisah, dan yang terakhir untuk orang paling spesial dalam hidup saya, yang sudah memberikan suport terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Ina Mutmainah, M. Ak yang selalu membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini hingga terselesaikan
4. Dosen Wali, Ibu Nur Fani Arisnawati, M.M yang telah memberikan bimbingan dalam masa perkuliahan
5. Teman teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah 2019 yang telah mengisi dan menemani dalam masa perkuliahan

## ABSTRAK

**SYARIFATUN NADIA.2023. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Akuntansi Syariah. Pembimbing Ina Mutmainah, M.Ak.**

Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pada artiannya mengandung kebijakan tata kelola desa dimana kebijakan tersebut memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut yaitu alokasi anggaran dana desa yang disalurkan dan untuk dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat apakah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dan di uji menggunakan SmartPLS 4, teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel yang diperoleh sejumlah 43 responden dan teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak dapat memoderasi variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian internal pemerintah

## **ABSTRACT**

**SYARIFATUN NADIA. 2023. *The Influence of Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, and Community Participation on Village Fund Management Accountability in the Moderation of the Government's Internal Control System in Siwalan District, Pekalongan Regency. Thesis of the Faculty of Islamic Economics and Business. Sharia Accounting Department. Advisor Ina Mutmainah, M.Ak.***

Law Number 6 of 2014 concerning villages explains that a village is a legal community unit that has the authority to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiative, original rights, and/or traditional rights that are recognized and respected in the government system. NKRI. In other words, it contains village governance policies where these policies provide great opportunities to improve the welfare of village communities. This policy is the allocation of the village fund budget which is distributed and managed by the village government. The aim of this research is to test and analyze whether human resource competence, use of technology and community participation influence accountability in village fund management and can be moderated by the government's internal control system.

The research method used in this research is using a quantitative method and tested using SmartPLS 4, the sampling technique uses a purposive sampling method and the sample obtained is 43 respondents and the data collection technique uses a questionnaire.

The research results show that human resource competence influences the accountability of village fund management and the government's internal control system can moderate community participation. Community participation and the use of information technology have no effect on the accountability of village fund management. The government's internal control system cannot moderate the variables of information technology utilization and information technology utilization.

*Key words: HR competency, use of information technology, community participation, accountability in village fund management and government internal control system*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustaqim, M. Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E, M.S.A selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Rinda Asytuti M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Segenap Dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staff.
7. Kedua orang tua dan sahabat yang selalu memberikan doa dan dukungan.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 26 Juli 2023

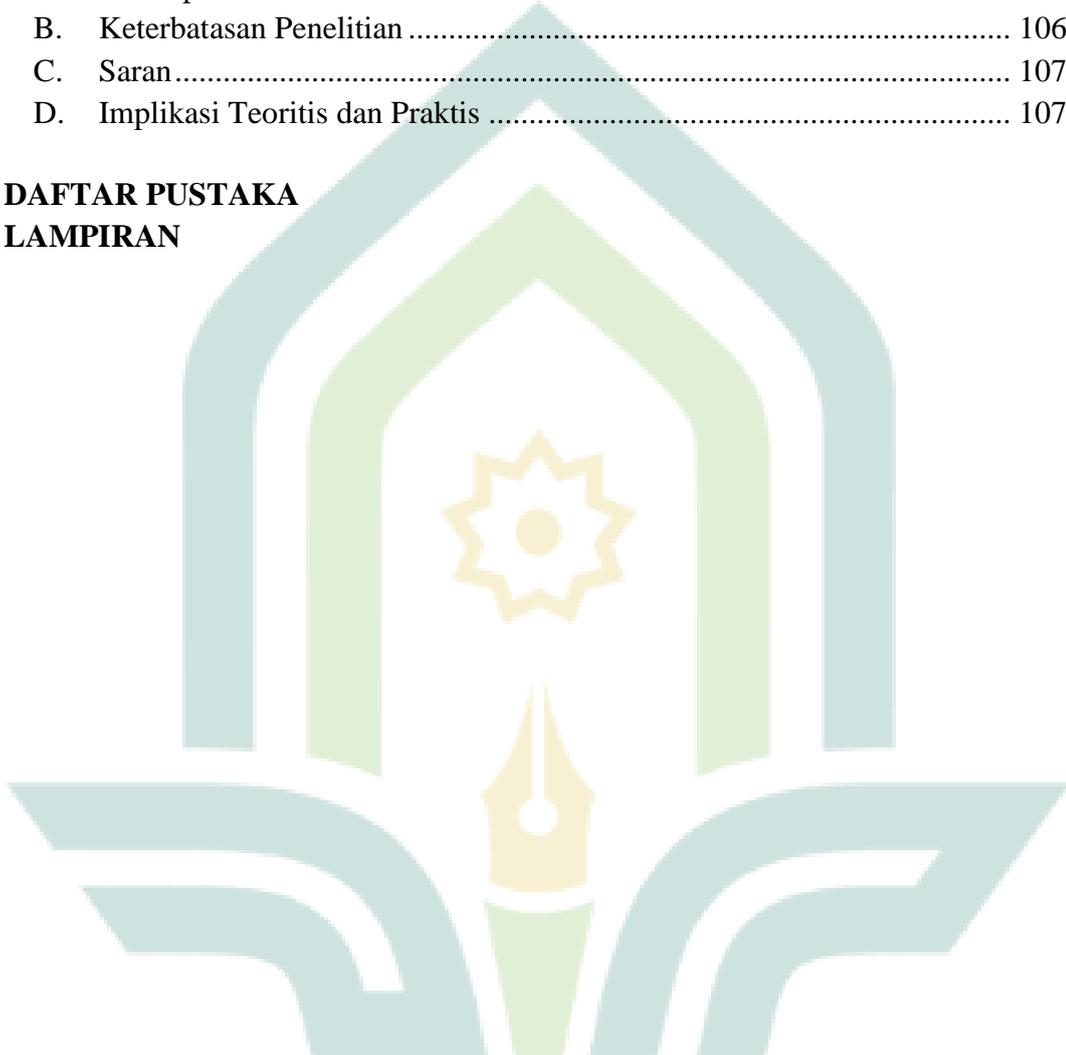


Syarifatun Nadia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	17
A. Landasan Teori .....	17
B. Telaah Pustaka .....	35
C. Kerangka Berfikir .....	42
D. Hipotesis .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	53
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Populasi dan Sampel .....	54
D. Definisi Operasional Variabel .....	59
E. Sumber Data .....	61
F. Teknik Pengumpulan Data .....	61
G. Metode Analisa Data .....	62

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Desrkipsi Data Penelitian .....	69
B. Analisis Data .....	73
C. Pembahasan .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Keterbatasan Penelitian .....	106
C. Saran.....	107
D. Implikasi Teoritis dan Praktis .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَّ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ      talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birru

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/  
Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

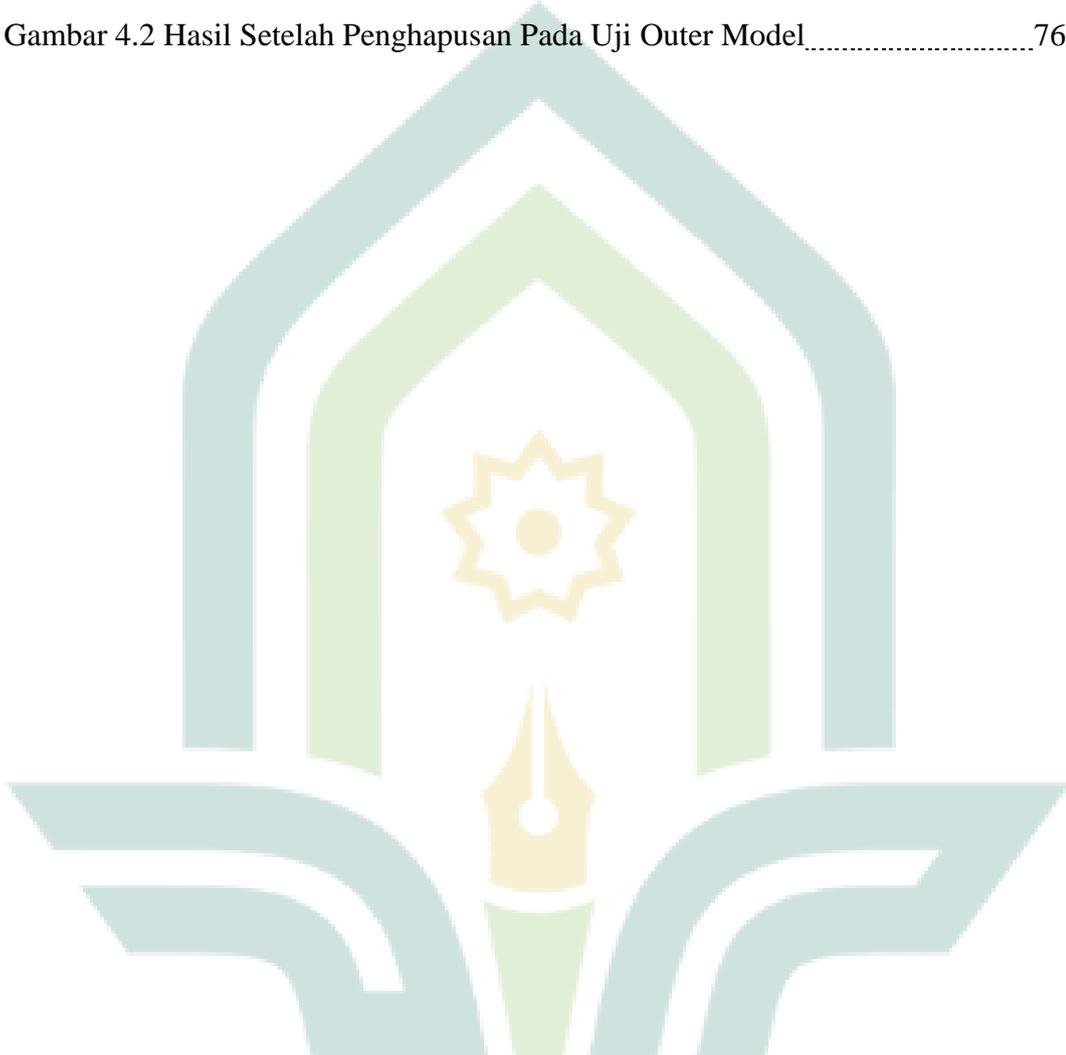
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 3.1 Populasi Penelitian .....	54
Tabel 3.2 Sampel Penelitian .....	58
Tabel 3.3 Variabel Penelitaian .....	59
Tabel 3.4 Kategori dan Nilai Skala Likert .....	61
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	71
Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin .....	71
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Usia .....	72
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	72
Tabel 4.5 Karakteristik Berdasarkan Jabatan .....	73
Tabel 4.6 Hasil Skema PLS Setelah Penghapusan .....	76
Tabel 4.7 Nilai Ave .....	77
Tabel 4.8 Output Pengujian Validitas Konvergen .....	79
Tabel 4.9 Dara Heteroit-Monirait Rasio (HTMT) .....	81
Tabel 4.10 Pengujian Konstruk Reliabilitas .....	83
Tabel 4.11 Nilai R-Square .....	85
Tabel 4.12 Pengujian F-Square .....	86
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis dari Path Coefficien .....	89
Tabel 4.14 Keputusan Hipotesis .....	90
Tabel 4.15 Jenis Moderasi .....	93

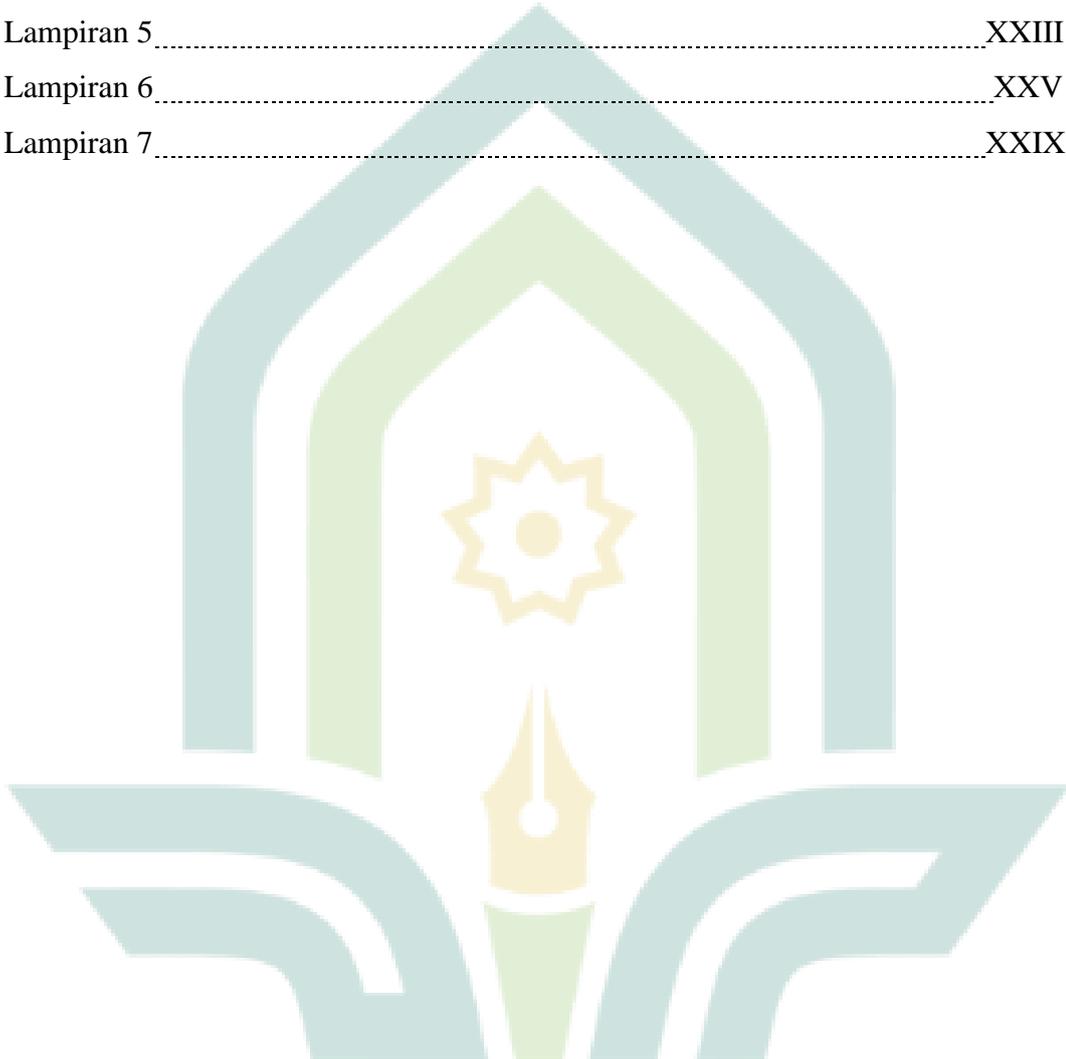
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kasus Korupsi.....	3
Gambar 1.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja..	6
Gambar 4.1 Hasil Skema Awal Pengujian.....	74
Gambar 4.2 Hasil Setelah Penghapusan Pada Uji Outer Model.....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	I
Lampiran 2 .....	IX
Lampiran 3 .....	XVII
Lampiran 4 .....	XX
Lampiran 5 .....	XXIII
Lampiran 6 .....	XXV
Lampiran 7 .....	XXIX



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa didasarkan oleh fakta bahwa dana desa merupakan sumber pendapatan penting bagi desa untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan dana desa seringkali tidak berjalan dengan baik karena minimnya pengawasan dan pengendalian yang memadai. Hal ini dapat berdampak pada penyalahgunaan dana desa atau penggunaannya yang tidak efektif. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut, desa diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dan melaksanakan audit atas pengelolaan dana desa. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang belum mampu menjalankan kewajiban tersebut dengan baik. Oleh karena itu, penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana desa telah memenuhi kewajiban tersebut dan bagaimana cara meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di masa depan.

Undang-Undang yang mengatur tentang akuntabilitas dana desa adalah Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan dana desa, mekanisme pengawasan, serta

kewajiban desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Dalam hal pelanggaran terhadap pengelolaan dana desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menetapkan sanksi yang berlaku bagi pihak yang melakukan pelanggaran, mulai dari teguran lisan hingga pencabutan dana desa. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih baik dan efektif. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah suatu jenis pemerintah yang menurut kaidah dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi urusan pemerintahan dan tugas-tugas yang terkait dengannya.

Pemberian otonomi kepada daerah diantisipasi untuk meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatuhan, serta untuk menonjolkan kebutuhan masyarakat luas. Karena itu, muncul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dilengkapi dengan sumber daya yang signifikan untuk mendukung pemerintahan sendiri serta kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Tujuan pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang terdiri dari wakil-wakil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah untuk meningkatkan derajat kemandirian desa melalui program dan prakarsa yang berkaitan dengan pembangunan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Untuk memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut di atas, maka pengelolaan dana desa perlu memperhatikan asas akuntabilitas. Dengan kredensial yang kuat dari pemerintah

desa, kemungkinan besar akan ada pemerintahan yang baik, yang dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada rakyat dan memberikan bantuan yang signifikan untuk peningkatan rakyat (Irma, 2018).

Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengenai praktik korupsi penggunaan dana desa pada tahun 2021 ditemukan 154 kasus korupsi diduga terkait dana desa. Menurut Lalola, pada temuan diatas menjadikan perhatian khusus. Sektor anggaran desa perlu diperketat oleh pengawas. Mempertimbangkan pada tahun 2022 anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah sebesar Rp 68 triliun. Berdasarkan posisi teratas dana desa itu disusul korupsi di wilayah pemerintah sebanyak 50 kasus, pendidikan 44 kasus, serta transportasi 40 kasus. Berikut adalah grafik pemetaan kasus korupsi di Indonesia:

**Gambar 1.1**



Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (ICW), 2021)

Ada sekitar 50 kasus korupsi teratas dana desa di sektor pemerintahan, 44 kasus termasuk pendidikan, dan 40 kasus transportasi. Pelaku yang paling banyak melakukan penyelewengan adalah ASN, swasta, dan kepala desa. Ketika UU No 6

Tahun 2014 tentang Desa diterbitkan, kasus korupsi yang melibatkan desa itu sendiri dilaporkan meningkat. ICW mencatat ada beberapa bukti korupsi yang sangat konsisten di Desa.

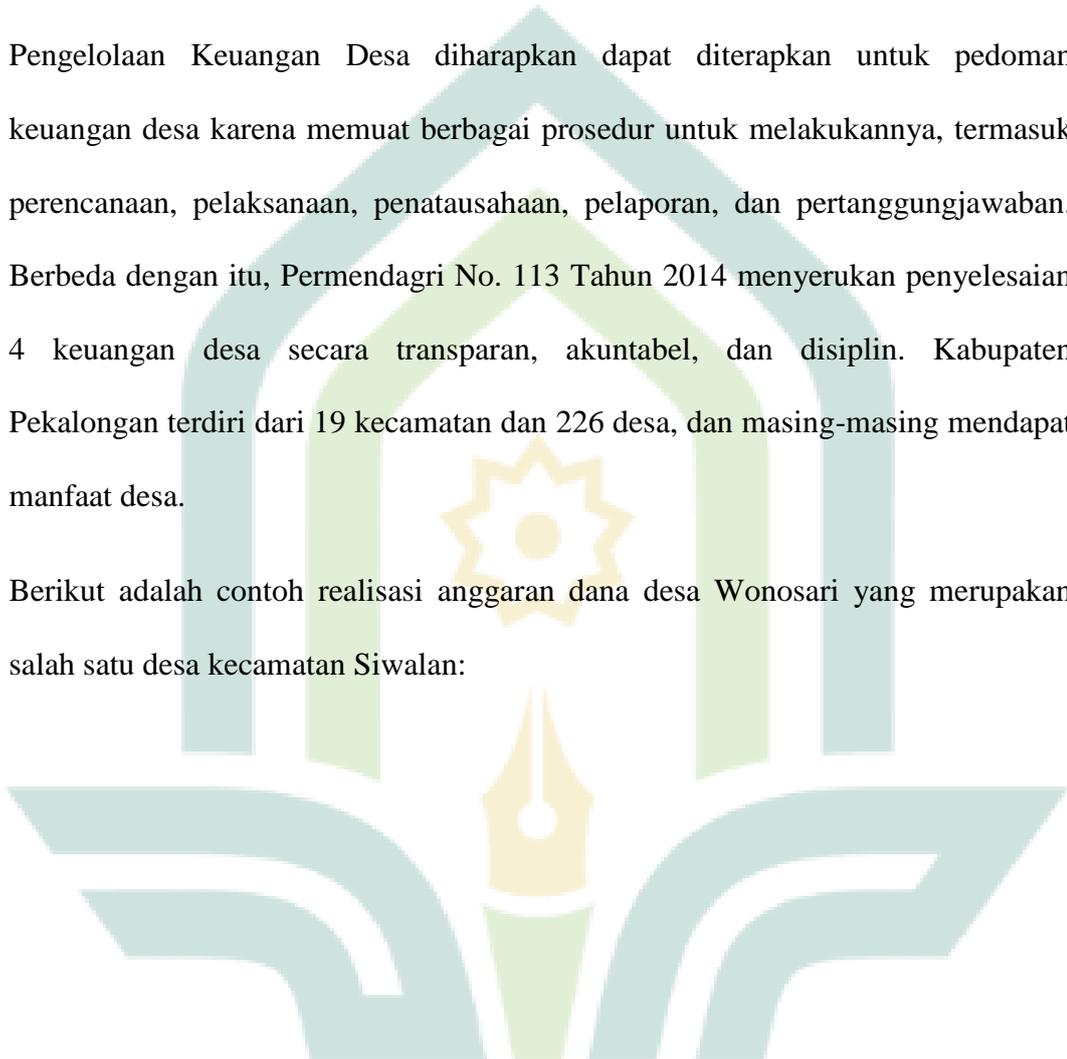
Sementara itu fenomena yang terjadi di salah satu kecamatan kabupaten Pekalongan yaitu kecamatan Siwalan pada tahun 2021 menurut Muh. Rohim (kasi pemerintahan) dan Inggil Tiara (kaur keuangan) di Kabupaten Pekalongan seperti di Kecamatan Siwalan Kepala Desa tersebut ditahan oleh Jaksa terkait kasus penggelapan dana APBdes dan tagihan pajak tahun 2020. Kepala Desa tersebut melakukan penyelewengan dana dan sekarang status Kepala Desa tersebut adalah DPO karena melarikan diri. Kronologinya adalah kedua perangkat desa tersebut bertandang kerumahnya kepala desa dan melihat rumah dalam keadaan kosong tak berpenghuni serta parbotannya sudah tidak ada termasuk motor yang merupakan inventaris desa. Kemudian keduanya melaporkan kepada ketua BPD Wonosari kecamatan Siwalan. Setelah mendapatkan laporan tersebut BPD beserta perangkat lainnya guna menindaklanjuti hal tersebut ke Inspektorat. Dana yang digelapkan antara lain Tagihan BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2018-2020, Tagihan Pajak Dana Desa (DDS) tahun 2020, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020. Menurut Muh. Rohim juga menambahkan bahwa perangkat desa tidak digaji selama delapan bulan.

Skenario seperti di atas harus dipertimbangkan jika pengelolaan desa-desa Pekalongan tidak berfungsi dengan baik karena kurangnya fungsi perencanaan dan pengendalian serta kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa setiap daerah

harus secara konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan saling menghargai dalam hal pengalokasian dana, meskipun satu-satunya pengecualian dari prinsip tersebut adalah terciptanya rasa saling menghormati.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat diterapkan untuk pedoman keuangan desa karena memuat berbagai prosedur untuk melakukannya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berbeda dengan itu, Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyerukan penyelesaian 4 keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan disiplin. Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan dan 226 desa, dan masing-masing mendapat manfaat desa.

Berikut adalah contoh realisasi anggaran dana desa Wonosari yang merupakan salah satu desa kecamatan Siwalan:



**Gambar 1.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESAN WONOSARI TAHUN ANGGARAN 2022				
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31\12\2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH(KURANG) (RP)
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	698.393.350,00	698.393.350,00	0
4.2.1	Dana Desa	698.393.350,00	698.393.350,00	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>698.393.350,00</b>	<b>698,393.350,00</b>	<b>0</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
5.2.	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	244.047.299,00	244.047.299,00	0
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	66.873.579,00	66.873.579,00	0
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	142.673.720,00	142.673.720,00	0
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0
5.2.7	Belanja Barang Dan Jasa Yang Diserahkan Kepada M	1.500.000,00	1.500.000,00	0
5.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>144.746.051,00</b>	<b>144.746.051,00</b>	<b>0</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin Dan Alat	5.000.000,00	5.000.000,00	0
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	132.246.051,00	132.246.051,00	0
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0
5.4	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>309.600.000,00</b>	<b>309.600.000,00</b>	<b>0</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	309.600.000,00	309.600.000,00	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>698.393.350,00</b>	<b>698.393.350,00</b>	<b>0</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Sumber: Kaur Keuangan Desa Wonosari

Pada laporan realisasi dana desa tersebut, menurut Kaur keuangan Desa Wonosari, biaya tidak terduga mengeluarkan dana desa yang sangat besar jika dibandingkan dengan biaya-biaya lainnya. Penyebab realisasi anggaran dana desa yang cenderung lebih besar pada biaya tak terduga daripada jenis pengeluaran lainnya dapat diakibatkan dari beberapa faktor, diantaranya adalah; ketidaktahuan dalam perencanaan anggaran, kendala teknis, kondisi lingkungan yang tak terduga seperti adanya bencana alam yang meliputi banjir rob setiap bulan Januari-Maret dan serangan hama atau penyakit seperti covid-19, kegiatan-kegiatan prioritas, dan ketidakpastian harga. Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya pihak desa dapat

lebih cermat dalam perencanaan anggaran dana desa, termasuk mengidentifikasi kemungkinan biaya-biaya tak terduga yang muncul, serta menyusun rencana cadangan dana untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan yang tidak terduga. Selain itu, pihak desa juga harus melaksanakan pengawasan dan monitoring yang lebih ketat terhadap pengeluaran dana desa agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaktransparan pengelolaan dana desa.

Menurut pendamping desa untuk wilayah di Kecamatan Siwalan untuk keperluan alokasi dana desa, anggaran desa yang cukup besar dari masing-masing pemerintah desa tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik guna mencegah terjadinya penyelewengan. Oleh karena itu, Perangkat Desa perlu menggunakan kewenangannya untuk membantu Kepala Desa dalam menangani dan mengelola dana desa. Hal ini dikarenakan Perangkat Desa dan Kepala Desa belum memiliki keahlian yang diperlukan dalam bidang pengelolaan usaha, kebijakan umum, dan pengelolaan sumber daya keuangan Desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain kompetensi SDM (sumber daya manusia) yang kompeten. Kompetensi sumber daya manusia terlibat pada pengelolaan dana desa juga mempengaruhi akuntabilitas. Dalam hal ini, pihak desa harus memperhatikan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana yang ada di desa, termasuk keahlian, integritas, dan tanggungjawab. Faktor kedua yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan menetapkan keputusan atas pengelolaan dana desa juga mempengaruhi akuntabilitas. Faktor ketiga yaitu pemanfaatan teknologi, pada zaman sekarang semua laporan keuangan dana desa

harus bisa memanfaatkan teknologi yang sudah canggih agar laporan tersusun rapi. Faktor keempat adalah sistem pengendalian internal yang baik juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, pihak desa harus menerapkan mekanisme pengendalian internal yang efektif untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan dana desa.

Kompetensi sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten merupakan salah satu hal penting dalam mengelola dana desa yang akuntabel dan efektif. Seiring dengan semakin kompleksnya tugas dan tanggungjawab pengelolaan dana desa juga semakin penting untuk memastikan akuntabilitas dan berkelanjutan pengelolaan dana desa. Oleh karenanya, peningkatan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola dana desa sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel serta membantu menciptakan manajemen yang baik dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang diriset oleh Wijaya (2017) menyimpulkan bahwa secara parsial kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Sweetenia et al., (2019) mengemukakan kompetensi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan manfaat relevan bagi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknologi informasi dapat membantu informasi dan mempercepat proses dalam mengelola data, meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan, serta memudahkan dalam pemantauan terhadap pengelolaan dana desa. Karena

perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan dan mempercepat masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki sarana untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah. Dengan begitu tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) dan Aulia (2018) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi sangat berpengaruh signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dana desa adalah dana yang disediakan dari pemerintah pusat kepada desa yang untuk digunakan dalam membangun dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Agar pengelolaan dana desa berjalan dengan lancar dan baik, serta transparan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan warga pada penentuan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi delima atau masalah dan potensi yang ada pada masyarakat. Sehingga transparansi pengelolaan keuangan dana desa dapat diterapkan (Novia, 2015). Pada penelitian Bani, R (2018) dan Adnan, dkk (2019) menyatakan bahwa secara parsial partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan pada penelitian Yustikasari (2021) variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh kompetensi SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah. Meskipun SDM yang kompeten penting untuk memastikan pengelolaan dana desa yang baik,

namun tidak adanya sistem pengendalian internal yang baik, kemampuan SDM tersebut masih dapat diabaikan atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya, sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu memaksimalkan potensi SDM yang kompeten dan meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana desa. Dalam hal ini, untuk mencapai akuntabilitas yang optimal dalam penanganan dana desa, kemampuan SDM dan proses pengambilan keputusan sistem internal pemerintah harus bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain.

Sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan hal ini, proses pengendalian internal pemerintah dapat membantu untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan sudah sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Selain itu, sistem pengendalian internal juga dapat meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Namun, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat juga dipengaruhi oleh kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Meskipun teknologi informasi dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun tanpa adanya SDM yang kompeten dan terampil dalam mengelola teknologi informasi, penggunaannya dapat menimbulkan risiko kesalahan atau kecurangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengelola dana desa untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan juga kualitas SDM dan sistem

pengendalian internal pemerintah yang ada. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal pemerintah juga dapat memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, sistem pengendalian internal pemerintah dapat membantu memastikan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal pemerintah juga dapat meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana desa yang terkait dengan partisipasi masyarakat. pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Tanpa adanya SDM yang kompeten dan terampil dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dapat menjadi tidak efektif atau bahkan dapat menimbulkan risiko kesalahan atau kecurangan.

Pemerintah memberikan dana puluhan miliar bahkan triliunan rupiah setiap tahunnya untuk dikendalikan masyarakat desa yang disebut dana desa yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan desa dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Pemerintah memberikan dana desa sebesar Rp 60 triliun di 2018. Lalu meningkat di tahun 2019 yaitu Rp 70 triliun, dan naik lagi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 71,19 triliun. Data tersebut di peroleh dari Kementerian Keuangan. Dengan jumlah dana yang begitu besar tersebut juga sangat beresiko terjadi penyelewengan yang mengarah pada korupsi bagi pemerintah desa yang

terkait dana desa itu sendiri. Pada beberapa keadaan, penggunaan Dana Desa rawan bertentangan dengan pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat untuk membangun desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Ketika sejumlah anggaran cukup besar yang diberikan kepada desa melalui dana desa, oleh karena itu muncul pertanyaan apakah desa beserta anggota yang ada mampu menjalankan amanah dalam mengelola anggaran tersebut dengan bijak dan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dengan adanya inkonsistensi dari peneliti terdahulu maka pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Moderasi Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa kecamatan Siwalan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa kecamatan Siwalan?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa kecamatan Siwalan?

4. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
6. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa kecamatan Siwalan.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa kecamatan Siwalan.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa kecamatan Siwalan.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

5. Untuk menguji dan menganalisis apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. Untuk menguji dan menganalisis Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan masalah diatas yang sudah di jelaskan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti:

1. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Diharapkan hasil perolehan penelitian mampu menjadi bukti empiris tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dimoderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan

Diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi para akademisi maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian dengan judul yang relevan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diyakini dapat membantu masyarakat, peneliti, dan penelitian selanjutnya terhadap bukti empiris yang ditemukan, agar dapat lebih memahami apa yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Didalam penyusunan penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat latar belakang masalah penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bagian ini mencakup landasan teori sebagai untunan pemecahan masalah, penelitian terdahulu sebagai pendukung dan digunakan sebagai pembanding kebaruan, kerangka berfikir serta hipotesis.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

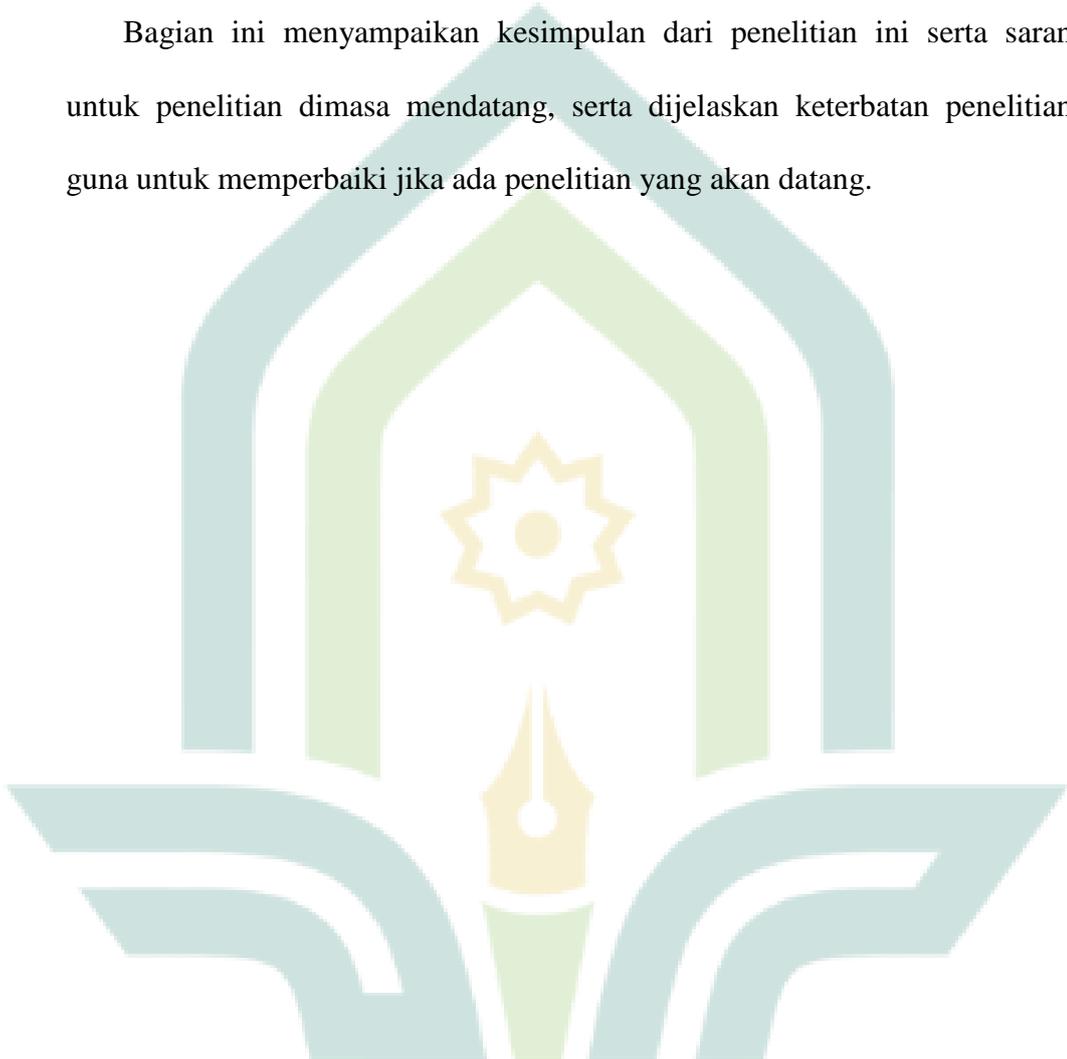
Bagian ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

##### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisikan hasil serta pembahasan dari analisis data yang telah dilakukan mencakup grafik dan output yang akan dipaparkan secara rinci sesuai topik penelitian.

#### BAB V : PENUTUP

Bagian ini menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini serta saran untuk penelitian dimasa mendatang, serta dijelaskan keterbatasan penelitian guna untuk memperbaiki jika ada penelitian yang akan datang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan dan dijelaskan secara rinci pada bab diatas, sehingga dapat menyimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan Kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Karena sumber daya yang berkompeten dan berkualitas dapat dilihat dari latar belakangnya seperti pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan.
2. Hasil analisis menunjukkan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Karena sebagian perangkat desa yang bertugas di kaur pemerintah, pembangunan, dan perencanaan masih menggunakan manual dan tidak memanfaatkan teknologi yang ada, karena faktor usia dan fasilitas yang kurang memadai sehingga kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman.
3. Hasil analisis menunjukkan Partisipasi Masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
4. Hasil analisis menunjukkan jika SPIP tidak mampu memoderasi Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Pada penelitian ini, SPIP cenderung lebih fokus pada pemeriksaan dan evaluasi

kinerja berdasarkan prosedur dan kebijakan yang ada di pemerintah desa. Peran SPIP di pemerintah desa yaitu cenderung mengutamakan kebijakam yang berkaitan dengan akuntabilitas, kepatuhan, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pemerintah, termasuk keuangan desa (dana publik).

5. Hasil analisis menunjukkan jika SPIP tidak mampu memoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Mereka (perangkat desa) kebanyakan masih menggunakan manual, hanya sekretaris desa dan kaur-kaur yang diharuskan menggunakan komputer. Dengan masih menggunakannta manual, sistem administrasi yang ada masih berjalan normal sehingga tidak diperlukannya pengawasan untuk hal tersebut.
6. Hasil analisis menunjukkan jika SPIP tidak mampu memoderasi Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Karena partisipasi masyarakat dalam memoderasi sistem pengendalian pemerintah akan sangat tergantung pada sejauh mana partisipasi tersebut efektif dan memiliki dampak nyata dalam mengawasi dan berpengaruh terhadap tindakan desa.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian telah dilakukan dan diselesaikan dengan jelas yang tentunya masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, ada beberapa keterbatasan di penelitian yang sudah dilakukan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pada hasil moderasi hipotesis yang kelima, hasil tersebut memiliki pengaruh namun masih lemah dan data t-table kurang dari 1,96, sehingga hasilnya tetap tidak dapat memoderasi.
2. Keterbatasan menggunakan instrumen kuisioner yang dibagikan kepada responden ada beberapa yang tidak kembali karena hilang, responden juga tidak mengisi kuisioner dengan sungguh-sungguh. Dikarenakan responden memiliki pemahaman yang berbeda.
3. Keterbatasan dalam mencari referensi yang sesuai dengan penelitian. Untuk penelitian yang variabel sistem pengendalian internal pemerintahnya dimoderasi sangat minim.

### **C. Saran**

Peneliti menganalisis dari pembahasan dan pengambilan keputusan, terdapat saran yang perlu diperbaiki supaya lebih baik lagi lalu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut:

1. Metode survei harap dilengkapi dengan teknik wawancara tatap muka supaya hasilnya menjadi akurat.
2. Peneliti selanjutnya harus menambah jumlah data sampel supaya lebih bagus hasilnya dari penelitian sebelumnya.
3. Menambah objek penelitian dengan menambah kecamatan lain

### **D. Implikasi Teoritis dan Praktis**

1. Implikasi Teoritis Didalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan terkait “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Partisipasi Masyarakat di

Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan”. Walaupun didalam penelitian ini tidak semua variabel memberi pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dan tidak dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah, namun adanya satu variabel yang menunjukkan adanya pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, yakni Kompetensi Sumber Daya Manusia sedangkan variabel yang tidak menunjukkan adanya pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat. Kemudian ada satu variabel yang menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah yaitu partisipasi masyarakat dan yang tidak dapat dimoderasi yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan ini dibuat dengan harapan bisa menambah kontribusi pada ilmu pengetahuan terkait teori agensi yang berhubungan dengan pemerintahan.

2. Implikasi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi praktis bagi pemerintah daerah agar akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa ditingkatkan. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan hasil penelitian yang dilakukan ini bisa menjadi suatu bahan untuk melakukan suatu evaluasi Desa Kecamatan Siwalan terutama didalam proses pengelolaan dana desa sehingga kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai dengan baik. Selain itu bagi Desa Kecamatan Siwalan

dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kinerjanya sehingga pertanggungjawabannya kepada publik masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan informasi akan pengelolaan dana desa dapat terpenuhi. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa, maka seharusnya Pemerintah Daerah melakukan pelatihan pelatihan terkait pengelolaan akuntabilitas dana desa, sehingga kualitas pengelolaan dana desa dapat terwujud.



## DAFTAR PUSTAKA

- (ICW), I. C. W. (2021). *Pemetaan Kasus Korupsi Sektor Tahun 2021*. <https://antikorupsi.org/>
- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2009). *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. BPFE.
- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pesindo.
- Afrianti, D. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)*. Universitas Diponegoro.
- Anggraeni, P. D. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). In *Skripsi* (Issue Agustus). Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Atiingsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1).
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota (Studi Empiris pada Kecamatan Harau, Kecamat. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 1–15.
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah : Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah* (Cetakan (1)). Ghalia.
- Dangeubun, B. A., & Warkula, Y. Z. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. *Accounting Research Unit: ARU Journal*, 3(November), 35–49.
- Erlanda, Rina., K. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah

- Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *Akuntansi Dan Keuangan*, 7(02), 137–154.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WARPPS 4.0* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono. (2008). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE.
- Heldawati. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kajian Ilmu Akuntansi*, 11 No. 1.
- Hutapea & Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ilhami, M., & Widhiastuti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10 No. 2.
- PERMENDAGRI 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 1 (2018).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, 1 (2018).
- Irma, A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(1), 121–137.
- Jaya, I. G., & Sumertajaya, I. M. (2008). *Pemodelan Persamaan Struktural dengan Partial Least Square*. *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2008*. FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jensen, Michael C. & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(10), 305–360.
- Juliandi, A. (2018). Structural equation model based partial least square (SEM-PLS): Menggunakan SmartPLS. *Urnal Pelatihan SEM-PLS Program Pascasarjana Universitas Batam*.
- Kadir, Abdul., & Wahyuni, T. C. (2003). *Pengenalan Teknologi Informasi* (Pertama). Andi.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, (2020).
- Krina. (2003a). *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Krina, L. L. (2003b). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance BPPN*, 1–25.
- Kurnia, & Kuswanti. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 12 (2).
- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Sambu Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2),
- Mardiasmoro. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). C.V Andi Yogyakarta.
- Muljo, H. H., & Kurniawati, Heny, P. (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Business Review*, 5(9), 537–550.
- Ningsih. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Ubud). *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*.
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532.
- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika, M. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 215–234.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian internal, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.* (n.d.).
- Perdana, K. . (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

- Prasetyo, T. . (2017). Pengelolaan Dana Desa Dan Pembangunan Desa Pada Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 7 (1).
- Puspa, D. ., & Prasetyo, R. . (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman). *Fakultas Ekonomi*.
- Ready, P. (2023). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Pada Desa-Desa di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Ti. UIN Raden Lampung*.
- Rioni, Y. S., & Saraswati, D. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 98–109.
- Rosyani, D. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1 Maret), 100–114.
- Sudarmanto. (2015). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. IKAPI.
- Supit, J. L., Nangoi, G. B., & Budiarmo, N. S. (2017). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Lowian Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 891–904.
- Susanti, Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendampingan Desa dan Pemantauan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-Desa di Kabupaten Siak Provinsi Riau). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 254–277.

- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56.
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596–1608.
- Ubaidillah, M., & Arumsari, D. (2019). Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalisme Sdm Dan Integritas Sebagai Variabel Intervening. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(1), 15–27.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481.
- Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.* (n.d.).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* (n.d.).
- Wafirotin, Z., & Septiviasuti, U. (2019). The Effect Of Transparency, Community Participation, and Accountability On Management Of Village Funds in Ponorogo Regency. *Journal of Economics*, 1 (1).
- Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja* (Keempat). Rajawali Persada.
- Wijaya, R. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas di Kabupaten Musi Banyuasin.* Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Yoga, I. M., & Putra, D. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132–158.
- Yustikasari, Y. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 14 No 1.
- Yusuf, B. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah.* PT. Raja Grafindo Persada.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. IDENTITAS

1. Nama : Syarifatun Nadia
2. Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 05 Maret 2000
3. Alamat rumah : Desa Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan
4. Alamat tinggal : Desa Gebangkerep Kec. Sragi, Kab. Pekalongan
5. Nomor handphone : 082325340553
6. Email : [n diasavana2@gmail.com](mailto:n diasavana2@gmail.com)
7. Nama Ayah : Bambang Sucahyo (Alm)
8. Pekerjaan Ayah : -
9. Nama Ibu : Supriyatiningih
10. Pekerjaan Ibu : Guru SD

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 03 Gebangkerep
2. SMP N 1 Sragi
3. SMA N 1 Kedungwuni

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM Sport, Humas Media dan Publikasi Dokumen, 2019
2. UKM Sport, Bendahara UKM Sport, 2021